

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGAMBILAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI
(Studi Kasus Pada BPKAD Kota Kendari)**

Oleh

La Ode Anto¹, Sulvariany Tamburaka², Andi Adelia Abbas³

**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari
Sulawesi Tenggara**

ABSTRAK

Penelitian Ini Untuk Mengetahui Penerapan sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Kendari. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Kendari. Pada Tahun 2009 Perogram Aplikasi SIMDA telah digunakan Di badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Kendari yaitu Sistem Manajemen Keuangan Daerah tersebut mempermudah dalam penyajian laporan keuangan daerah sebagai alat bantu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang saat ini telah banyak di implementasikan di pemerintah daerah.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Pengambilan Kebijakan Akuntansi.

ABSTRACT

This Research to know the implementation of accounting information system in the accounting policy of the regional government of Kendari. The methods of collecting data in this study are interview methods and documentation. The method of research used is a method of descriptive analysis. The research showed that the implementation of accounting information system in the accounting policy taking place of Kendari. In year 2009 SIMDA application has been used in the body of the financial management of the city of Kendari, namely the regional financial management system makes it easier to present the regional financial report as a tool in order to finance the local government, which is currently a lot implemented in local governments.

Keywords: Accounting Information System, Accounting Policy Retrieval.

I. PENDAHULUAN

Pada masa perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini sangatlah diperlukan informasi-informasi yang menunjang bagi kemajuan dan kepentingan organisasi, Baik organisasi sektor privat maupun sektor publik. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah guna memenuhi keuangan masyarakat. Pemerintah Daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara hak daerah berupa perolehan pendapatan dengan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka inilah, Pemerintah daerah membutuhkan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pemerintah daerah membutuhkan informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD tersebut untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fisik yang dituangkan pada praturan daerah (PERDA) tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Dengan demikian LKPD diharapkan mampu memberikan peran penting dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam rangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Informasi akuntansi merupakan data penting berupa keuangan yang dibuat oleh suatu entitas atau organisasi dan memiliki manfaat untuk memberi pemahaman mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Adapun informasi akuntansi dalam pemerintah daerah LKPD salah satu peran dan tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dalam rangka pengambilan fisik pemerintah daerah. Informasi akuntansi tersedia atau layak di jadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ketika LKPD telah di audit serta tutup buku pada akhir periode.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tujuan yaitu memperbaiki Informasi yang dihasilkan. Saat ini pemerintah mengembangkan suatu program Aplikasi komputer yang diberi nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) yang mulai diperkenalkan pada tahun 2009. Program aplikasi tersebut dikembangkan Oleh BPKAD Kota Kendari Guna membantu pengelolaan keuangan daerah baik ditingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) entitas akuntansi. Adanya program aplikasi ini diharapkan mampu memberikan manfaat lebih kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Terdapat banyak aplikasi SIMDA yang diterapkan oleh sekretariat BPKAD Kota Kendari diantaranya adalah SIMDA bidang Keuangan yang membantu dinas mengolah data keuangan serta melaporkan data keuangan ke instansi di atasnya.

Tetapi dalam aplikasinya terdapat beberapa masalah yaitu penyusutan didalam aplikasi SIMDA tidak diakui sehingga masih perlu melakukan hitungan secara manual. Hal ini terjadi karna transaksi penyusutan yang nilainya dibawah 1.000.000 tidak diakui nilainya di aplikasi SIMDA. Dan masih ada beberapa pos-pos akun yang tidak ada di aplikasi SIMDA seperti dana BULD dan dana BOS.

Tujuan penerapan SIMDA keuangan ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Dalam Suatu Lembaga Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi sangat penting dalam mengatur arus pengelolaan data akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat dan akurat. Suatu Sistem Informasi Akuntansi disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berguna bagi pihak ekstren dan intren. Akuntansi memegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan operasi suatu perusahaan. Terutama pada pemeberian informasi keuangan untuk pengambilan keputusan yang relevan kepada perorangan atau kelompok baik yang berada dalam sistem maupun diluar sistem. Untuk mengerti apa itu sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen maka perlu memahami apa yang dikatakan dengan sistem dan apa itu sistem informasi. Secara

harfiah kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu Sistem yang dapat diartikan sebagai “keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam bagian“. Untuk memahami sistem maka perlu mengetahui definisi sistem itu sendiri. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

Baridwan (2004:2) mendefinisikan; “Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur yang berhubungan dan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh (terintegritasi) untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan“. Menurut Mulyadi (2002:2) memberikan pengertian mengenai sistem sebagai berikut : “setiap sistem terdiri dari unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan yang berkerjasama mencapai tujuan sistem. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar“.

Dari definisi sistem tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem adalah suatu kumpulan dari prosedur atau elemen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi sistem sangat diperlukan sehingga unsur-unsur dari sistem tersebut dapat bekerjasama untuk melaksanakan suatu kegiatan perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan Informasi adalah vital bagi badan usaha atau organisasi lainnya. Informasi ini penting bagi setiap perusahaan. Dalam hal informasi ini diibaratkan darah karena sama dengan tubuh manusia yang mendapatkan darah. Dimana tubuh tersebut akan mati tidak berfungsi lagi. Begitu pula sistem yang tidak dapat mendapatkan informasi maka sistem tersebut akan lumpuh dan akhirnya akan mati total informasi informasi yang berguna bagi sistem yang bersangkutan akan menghindari proses kelumpuhan dari sistem itu sendiri.

Perlu dibedakan data dan Informasi itu sendiri karena sering terjadi salah pengertian antara data dengan informasi. Data merupakan suatu dari input yang belum ada manfaatnya untuk tujuan yang diinginkan. Data ini setelah diolah akan digunakan oleh orang yang membutuhkan maka data ini akan menjadi informasi. Lebih lanjut dibawah ini akan diberikan definisi tentang informasi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu: Menurut Wilkison (2005:5) Setelah diterjemahkan; “informasi merupakan keterangan-keterangan yang berarti dan berguna untuk orang yang menggunakan seperti yang diharapkan“. Dari pendapat diatas terlihat bahwa suatu informasi merupakan data yang diolah menjadi Bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimaannya. Menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata yang digunakan untuk mengambil keputusan.

Mulyadi (2002:11); “Sistem Informasi merupakan terintegritas untuk mengumpulkan mengklasifikasikan memproses mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan kepada semua pihak yang membutuhkan baik interen maupun eksteren “. Dari definisi sistem informasi tersebut maka diambil kesimpulan bahwa informasi adalah kumpulan dari data yang harus diolah dan diproses juga dikelompokkan yang berguna bagi orang yang membutuhkan data tersebut sebagai bahan informasi perusahaan. Sedangkan pengertian informasi adalah suatu kumpulan dari suatu prosedur atau kerangka yang saling berhubungan dari data yang diolah dan diproses juga dikelompokkan dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan kesemua yang membutuhkan untuk mencapai suatu tujuan.

George H. Bodnar (2006:1), “Sistem informasi dan akuntansi adalah mendefinisikan juga mengumpulkan serta memproses dan mengkomunikasikan informasi ekonomi tentang kesatuan untuk memperluas keragaman/kemampuan orang, “ Soemarmo (2009:64); “pada hakekatnya akuntansi merupakan sistem informasi terhadap masalah operasi yang ekonomis dan efisien. Akuntansi juga membentuk sebagian besar informasi umum yang dinyatakan secara kualitatif.

Dalam konteks ini akuntansi menjadi bagian dari sistem informasi umum dari suatu keastuan yang beroperasi. Sekaligus menjadi bagian dari suatu bidang dasar yang dibatasi oleh konsep informasi“. Dari definisi akuntansi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses yang terdiri dari informasi tersebut dapat dijadikan suatu bahan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Krismiaji (2010) sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis“. Dalam suatu perusahaan, penerapan sistem informasi akuntansi memiliki hubungan dengan sistem-sistem yang lebih besar maupun kecil.

Contoh Sistem Informasi Akuntansi sebagai pusat informasi perusahaan: Bagian pemasaran mempertimbangkan untuk memperkenalkan jenis produk baru dalam jajaran produksi perusahaan, untuk itu bagian tersebut meminta laporan analisa perkiraan keuntungan yang dapat diperoleh dari usulan produk baru tersebut. Bagian SIA memproyeksikan perkiraan biaya dan perkiraan pendapatan yang berhubungan dengan produk tersebut, kemudian diberikan ke bagian pemasaran. Kedua bagian akan merundingkan hasil analisa tersebut untuk dicari keputusan yang sesuai. Dari contoh diatas dapat ditemukan 2 Aspek yang berhubungan dengan sistem bisnis modern yaitu:

1. Pentingnya komonikasi antar departemen yang mengarah untuk tercapainya suatu keputusan.
2. Peranan SIA dalam menghasilkan informasi yang dapat membantu departemen lainnya untuk mengambil keputusan. Informasi Akuntansi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi dibedakan menjadi 2 yaitu:
 - Informasi Akuntansi keuangan berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak extern.
 - Informasi Akuntansi Manajemen, berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Contoh Sistem Informasi Akuntansi sebagai pusat informasi perusahaan: Bagian pemasaran mempertimbangkan untuk memperkenalkan jenis produk baru dalam jajaran produksi perusahaan, untuk itu bagian tersebut meminta laporan analisa perkiraan keuntungan yang dapat diperoleh dari usulan produk baru tersebut. Bagian SIA memproyeksikan perkiraan biaya dan perkiraan pendapatan yang berhubungan dengan produksi tersebut, kemudian data yang diperoleh diproses oleh EDP. Setelah diproses hasilnya dikembalikan ke bagian SIA untuk kemudian diberikan ke bagian pemasaran. Kedua bagian akan merundingkan hasil analisa tersebut untuk dicari keputusan yang sesuai. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terdiri dari 3 subsistem:

- Sistem Pemrosesan transaksi mendukung proses operasi bisnis harian.
- Sistem buku besar/pelaporan keuangan menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba/rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak.
- Sistem Pelaporan Manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, seperti anggaran, laporan pertanggungjawaban.

Penggunaan Aplikasi SIMDA pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kota Kendari

Guna meningkat tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas Pengelolaan Keuangan Daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif (value for money), maka salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan menggunakan Aplikasi SIMDA yang diatur dalam peraturan Pemerintah Kota Kendari tentang Kebijakan

Akuntansi. Aplikasi SIMDA digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan keuangan.

Informasi yang telah diuraikan memperjelas bahwa penggunaan aplikasi SIMDA dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan sangat membantu. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan daerah dalam Rosmery Elsy et al., (2016;2). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I, bagian pertama tentang ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Daerah Bab I, bagian pertama tentang ketentuan umumnya menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya pada bagian sepuluh pasal 232 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dan Manfaat SIMDA dalam Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Kendari.

Pada hakikatnya Penerapan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) itu sendiri memiliki tujuan untuk dapat mempermudah kinerja para pegawai dalam melakukan penyusunan laporan keuangan dan data keuangan, sehingga mampu memberikan efektifitas dan efisiensi. Tujuan diterapkannya aplikasi Simda adalah Sebagai tempat tukar menukar informasi, Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam, Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-government dan Sebagai sarana untuk pelaksanaan good Government. Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi adalah sebagai Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yg sama, Data Yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin) dan Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi perogram Aplikasi SIMDA Dalam Pengambilan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Kendari

Fungsi utama Pengemplementasikan Simda Keuangan adalah:

1. Membantu pemerintahan daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban);
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan
5. Mempermudah proses audit bagi auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Elektronik Data Processing (EDP) audit.

Adapun Output yang Dihasilkan dari aplikasi SIMDA yaitu: Penganggaran, penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keugan, laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-beda, seperti anggota legislatif, dan anggota

masyarakat pemakai penting lain meliputi auditor, pemasok, pelanggan, organisasi perdagangan, analisis keuangan, calon investor, penjamin, ahli statistik, ahli ekonomi pihak yang berwenang membuat peraturan, kreditor dan karyawan.

Menurut perwali kendari No.21 tahun 2015 pasal 2: menjelaskan bahwa Kebijakan akuntansi pemerintah daerah kota kendari menerapkan SAP Berbasis Akrua, kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi akun, Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi akan mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas: pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Menurut perwali kendari No.21 Tahun 2015 pasal 3:

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
 - a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - b. Penyajian Laporan Keuangan
 - c. Laporan Realisasi Anggaran
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - e. Neraca
 - f. Laporan Operasional
 - g. Laporan Arus Kas
 - h. Laporan Perubahan Ekuitas
 - i. Catatan atas Laporan Keuangan

Pengertian Pemerintah Daerah

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Definifi pemerintah daerah berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut.

“Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”

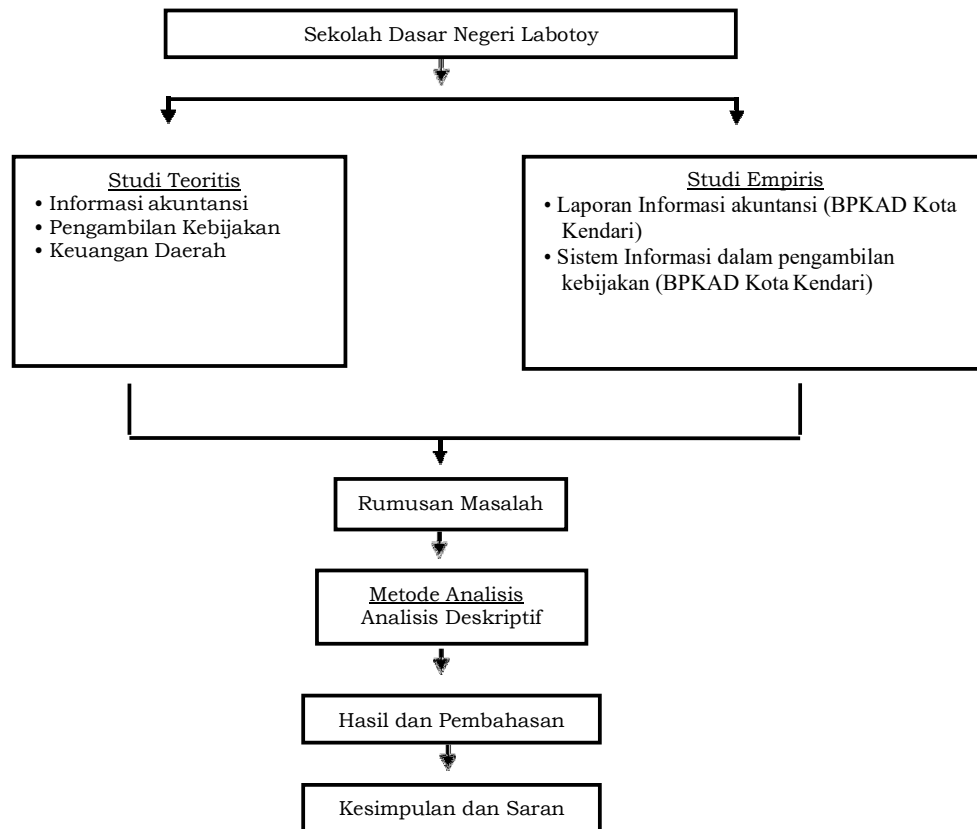
Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintah daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi, dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari: unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, yang diwadahi dalam secretariat; unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat; unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yang diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasnya-seluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan susunan pemerintah.

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Akuntansi Jenis data dalam penelitian ini adalah Data kualitatif berupa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi. Data Penelitian ini merupakan penelitian yang seringkali merujuk pada penggunaan data kualitatif yaitu berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode tanya jawab untuk mendapatkan informasi tertentu mengenai apa yang dikehendaki, dengan cara menggali informasi serta melihat kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat diperoleh informasi yang relevan, dan anda. Dengan melakukan observasi lapangan serta wawancara berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa wawancara Kepada Kepala bagian Akuntansi Bpkad kota kendari. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, literatur, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen, wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode Analisis deskriptif menganalisis data yang dihasilkan melalui wawancara terhadap subyek penelitian, sehingga peneliti dapat memecahkan pokok persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan beberapa pokok persoalan berikut pemecahan masalahnya juga peneliti dapat memberikan beberapa saran yang merupakan bagian dari solusi dalam memecahkan persoalan yang timbul dalam penelitian ini.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Penerapan Sistem informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Kendari

Penerapan sistem informasi akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kota kendari diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tujuan yaitu memperbaiki informasi yang dihasilkan. Saat ini pemerintah Mengembangkan Suatu program Aplikasi SIMDA (Sistem manajemen daerah) yang mulai diperkenalkan pada tahun 2009. Program aplikasi tersebut di kembangkan oleh BPKAD Kota Kendari guna membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPD (satuan kerja perangkat daerah) entitas akuntansi. Adanya Program Aplikasi ini diharapkan mampu memberikan manfaat lebih kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggung jawaban APBD.

Penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan keuangan pemerintah Kota Kendari sudah terlaksana dan di kelola oleh BPKAD Kota Kendari yang mana bertugas untuk memberikan saran dalam pengambilan kebijakan keuangan di setiap OPD yang ada di Kota Kendari. Pengelolaan sistem informasi akuntansi pada BPKAD Kota Kendari dikelola oleh bagian bidang akuntansi yang mana pada bidang ini terdiri dari 30 pegawai dan mayoritas pegawainya berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang akuntansi BPKAD Kota kendari Bapak La Ode Maarfin. N, dijelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem informasi akuntansi terkait dengan pencatatan transaksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu terkait dokumen-dokumen yang harus menjadi dokumen sumber pengimputan data, Operatur yang akan menginput ke aplikasi, setelah di input bendahara mensahkan dokumen permintaan pembayaran untuk penerbitan SPM harus di verifikasi oleh PPK, level PPK memferifikasi dokumen jika dinyatakan lengkap maka di terbitkan SPMnya maka di sahkan oleh pengguna anggaran mengajukan ke BPKAD. Jadi terkait dengan transaksi-transaksi yang ada di OPD itu nanti di lakukan oleh PPK terkait penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan keuangan dilihat dari pelaporan atau pertanggungjawaban penyusunan laporan keuangan dari hasil peloparan penyusunan pertanggungjawab anggaran, tahapan-tahapan yang dilakukan ketika akan melihat sistem informasi akuntansi itu sendiri dimulai dari melihat laporan keuangan persemester dari masing-masing OPD yang telah merampungkan dan memfinalisasi semua transaksi-transaksi yang ada di OPD setelah merampungkan laporan keuangan, laporan keuangan yang di OPD tadi di berikan ke pihak BPKAD sebagai konsolidator yang terlebih dahulu akan diproses dibagian akuntansi BPKAD itu untuk melihat laporan keuangan yang

diserahkan dari masing-masing OPD, jadi setelah bagian akuntansi telah rampung memeriksa laporan keuangan dari masing-masing OPD maka laporan keuangan tadi sudah dapat digunakan untuk menjadi acuan dalam melihat sistem informasi akuntansi yang dapat digunakan untuk kepentingan BPKAD kota kendari. Sistem informasi akuntansi dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan keuangan pemerintah daerah selanjutnya, dalam mengambil keputusan kebijakan ini terlebih dahulu dilakukan rapat pengambilan kebijakan bersama dengan para pimpinan. Bentuk Sistem Informasi Akuntansi yang ada di BPKAD Kota kendari adalah aplikasi SIMDA merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Disisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintahan daerah. Salah satu aplikasi SIMDA adalah SIMDA Keuangan yang merupakan suatu program aplikasi yang ditunjukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, BPKAD dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporannya. mulai dari penganggaran sampai pada pelaporan pertanggungjawaban, Alasan BPKAD Kota Kendari menggunakan aplikasi SIMDA dikarenakan aplikasi SIMDA ini sudah sangat mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan Pemda Kota Kendari dalam hal sistem informasi akuntansi. Produk-produk dari hasil penggunaan aplikasi SIMDA di BPKAD Kota Kendari berupa program aplikasi SIMDA untuk mengelola keuangan daerah, aplikasi SIMDA untuk mengelola barang milik daerah, aplikasi SIMDA untuk mengelola gaji para pegawai negeri daerah, mengelola pendapatan daerah dan juga mengelola pengeluaran yang menyangkut surat perintah perjalanan dinas. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sistem informasi Akuntansi Dalam Penerapan Aplikasi SIMDA

Dalam Penerapannya, SIMDA di Sekertariat BPKAD kota Kendari tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan penerapan Aplikasi SIMDA tidak berjalan dengan optimal. Adapun Menurut BPKAD ada beberapa faktor-faktor penghambat yang menjadi masalah dalam penerapan SIMDA diberbagai daerah diindonesia diantaranya yaitu:

Sumber daya manusia

sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting yang menjadi dasar keberhasilannya penerapan SIMDA sehingga kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia itu sendiri juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan:

Teknologi

Dukungan Terhadap penerapan SIMDA juga akan berjalan lancar apabila didukung dengan teknologi yang memadai, karna dalam penerapan SIMDA ini sendiri terkadang masih muncul permasalahan teknis yang sering terjadi selain Human eror itu sendiri, masalah teknis itu meski kecil tetapi masih tetap harus dilakukanantisipasi, antisipasi yang paling pertama di lakukan adalah mengetahui jenis masalah teknis yang sering muncul.

Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai merupakan komponen yang penting dalam penerapan

program SIMDA, sehingga infrastruktur tersebut harus sangat memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar. Kurangnya infrastruktur yang menunjang dalam penerapan SIMDA di BPKAD kota Kendari.

Pembahasan

A. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Kebijakan

Penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan keuangan pemerintah Kota Kendari sudah terlaksana dan di kelola oleh BPKAD Kota Kendari yang mana bertugas untuk memberikan saran dalam pengambilan kebijakan keuangan di setiap OPD yang ada di Kota Kendari. Penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan akuntansi di BPKAD Kota Kendari memiliki peran yang penting dalam pengambilan kebijakan, karena dari hasil penelitian yaitu berupa wawancara dapat dilihat bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan akuntansi pihak BPKAD mengacu pada informasi akuntansi yang tersedia. Sistem Informasi akuntansi yang terdapat di BPKAD Kota kendari menggunakan Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA).

Sistem informasi akuntansi dalam SIMDA ini adalah berupa laporan keuangan Pemda yang mulai dari penganggaran sampai pada pelaporan pertanggungjawaban, dari hasil output SIMDA inilah digunakan untuk melihat informasi-informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan akuntansi. Selain dari SIMDA, informasi dalam SIA yang berguna dalam pengambilan kebijakan akuntansi atau keuangan adalah berupa laporan serapan dana di pemda, dari laporan serapan dana ini kita bisa lihat pencapaian output yang di capai oleh masing-masing OPD yang ada di Kota Kendari dari pencapaian ini dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan.

Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokkan, pengolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing OPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi akuntansi ini juga sangat berguna dalam pengambilan kebijakan karena dengan adanya sistem informasi akuntansi ini dapat membantu khususnya pemda dalam mengambil kebijakan akuntansi untuk kebijakan apa yang akan di gunakan kedepannya. Prosedur Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Kendari.

Tujuan dan Manfaat SIMDA dalam Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Kendari

Pada hakikatnya Penerapan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) itu sendiri memiliki tujuan untuk dapat mempermudah kinerja para pegawai dalam melakukan penyusunan laporan keuangan dan data keuangan, sehingga mampu memberikan efektifitas dan efisiensi. Tujuan diterapkannya aplikasi Simda adalah:

1. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama pemerintah koneksitas jaringan SIMDA.
2. Sebagai alat komonikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja Penerima koneksitas Jaringan SIMDA.
3. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya.
4. Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-government; dan
5. Sebagai sarana untuk pelaksanaan good Government. Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi adalah sebagai berikut:

- a. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yg sama;
- b. Data Yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin);
dan
- c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan.

Upaya yang dilakukan dalam menangani kendala Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan keijakan pada aplikasi SIMDA

Dalam penerapan SIMDA keuangan ada beberapa upaya yang harus dilakukan agar penerapannya berjalan lancar, seperti apa yang tercantum dalam strategi penerapan basis akrual secara penuh di Indonesia yaitu diantaranya:

1. *Necessary condition* (Kondisi yang diperlukan)
Komitmen dari para pemimpin mengenai sistem akuntansi berbasis akrual sudah dibangun semenjak adanya peraturan pemerintah muncul. Dengan adanya sistem akuntansi berbasis akrual maka diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan daerah yang lebih riil dan sesuai dengan input maupun outputnya. Oleh karena itu dengan adanya aplikasi SIMDA keuangan dapat membantu pengelolaan keuangan yang terintegrasi secara langsung dan bersifat *online* mampu memudahkan pengawasannya.
2. Kapasitas SDM masa awal penerapan akuntansi berbasis akrual pemerintahan memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan, maka pemerintah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM dibidang akuntansi pemerintahan. Sumber daya manusia yang ada di pemerintah daerah kota kendari memiliki beberapa kekurangan diantaranya dari segi jumlah dan kemampuan yang mampu memahami dalam penerapan SIMDA keuangan masih sedikit, hal tersebut di tunjukan dari rata-rata latar belakang tentang IT dan akuntansi. Secara tidak langsung memiliki kompetensi tersebut baru mendapatkan pengetahuan mengenai SIMDA keuangan setelah mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan di BPKAD Kota Kendari.
3. Dana pemeliharaan yang dianggarkan oleh BPKAD Kota Kendari dilihat dari kondisi realisasi anggaran antara lain pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan komputer baik aplikasi atau sistem pemeliharaan jaringan internet.

2. Sufficient Condition (Kondisi yg cukup)

- a. Produser: sistem dan produser yang menjelaskan teknik-teknik pencatatan penyiapan dokumen, sampai dengan basis akrual penuh. Dengan menggunakan aplikasi SIMDA keuangan, sistem akuntansi dan pelaporan dapat mempermudah kinerja para pegawai dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga BPKAD Kota Kendari menerapkan program tersebut dengan harapan mampu menghasilkan hasil laporan keuangan Daerah yang sesuai dengan akuntansi Negara.
- b. Teknologi: aplikasi Penatausahaan dan akuntansi yang mengkomodasi basis akrual di dalamnya agar penerapan basis akrual ini dapat sesuai harapan. Dengan penerapan aplikasi SIMDA di seluruh SKPD yang terintegrasi langsung mampu memberikan kemudahan serta kecepatan dan ketepatan dalam melakukan pelaporan keuangan, penerapan teknologi aplikasi SIMDA dijalankan oleh tim yang dibentuk khusus untuk melakukan penerapannya yaitu tim pengelola SIMDA. Meskipun dalam penerapannya masih terkendala masalah teknis seperti jaringan internet yang kadang masih terhambat tetapi mencoba melakukan upaya peningkatannya dengan menyediakan wifi tersendiri meskipun jaringan *wifi portabel* yang dimiliki hanya mampu menjangkau perangkat secara terbatas. Jaringan internet yang masih belum

memadai ini diharapkan segera ditingkatkan lagi oleh BPKAD kota kendari agar mampu memberikan hasil Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Kebijakan akuntansi lebih baik lagi. Selain itu juga melakukan antisipasi yang baik terhadap segala bentuk kegagalan terhadap sistem yang dapat mengakibatkan tertundanya proses pengelolaan data keuangan seperti pengadaan cadangan server.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data-data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai setelah penerapannya Aplikasi SIMDA karna dapat lebih cepat, akurat dan tepat waktu. Aplikasi SIMDA juga membantu memudahkan proses penyusunan laporan keuangan, pegawai tinggal mencatat/menginput data pada sistem. SIMDA terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian penatausahaan, bagian penganggaran, bagian akuntansi dan pelaporan. Bagaimana setiap bagian bekerja secara terintegrasi dan saling terhubung satu sama lainnya. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Kebijakan Akuntansi dilakukan dengan melihat sistem informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan keuangan, yaitu melihat pelaporan atau pertanggungjawaban penyusunan laporan keuangan dari hasil peloparan penyusunan pertanggungjawab anggaran, tahapan-tahapan yang dilakukan ketika akan melihat sistem informasi akuntansi itu sendiri dimulai dari melihat laporan keuangan persemester dari masing-masing OPD yang telah merampungkan dan memfinalisasi semua transaksi-transaksi yang ada di OPD. Dampak yang diberikan dengan adanya Sistem informasi akuntansi ini adalah ketika pihak BPKAD akan mengambil kebijakan mereka bisa menggunakan sistem informasi ini sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan sehingga lebih meminimalisir kesalahan dalam pengambilan kebijakan akuntansi maupun keuangan. Informasi akuntansi (laporan keuangan) tidak hanya menjadi aksesoris tetapi memiliki peran yang sangat berarti dalam pengambilan keputusan atau kebijakan bagi pemda untuk menentukan kebijakan akuntansi apa yang akan digunakan kedepannya.

Manfaat

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Kendarisedekah. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya dan menjadi bahan kajian yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah yang ada saat ini. Diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah kota kendari dalam pengambilan kebijakan serta penyusunan laporan keuangannya yang berkualitas, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam peroses dan memperoleh data dari narasumber. mengingat waktu yang dimiliki Kepala Bidang akuntansi BPKAD Kota Kendari sangat terbatas, maka kesempatan waktu ditentukan terlebih dahulu sehingga peroses memperoleh informasi penelitian sedikit terhambat. Kedua.

Saran

1. Pemerintah mengadakan sosialisasi di instansi-instansi pemerintah mengenai pentingnya sistem informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan akuntansi.

2. Pemerintah lebih sering mengadakan pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia) terkait informasi akuntansi
3. Penelitian ini masih terdapat keterbatasan maka diharapkan lagi penelitian selanjutnya dapat mengganti variable yang ada dan atau menambahkan variable lain tentang penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, Lili Setiawati. 2011. Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan Prosedur dan Penerapan. Edisi 1 Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Anurudin, Mohamad. 2012. Pengertian dan Asas-Asas Pemerintahan Daerah.
- Arief, Anandita. 2010. Peran Laporan Keuangan dan Intuisi Dalam Pengambilan Keputusan Kredit. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Boodnar, George H and s hopwood, 2006. Sistem Informasi Akuntansi, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Depdagri. 2007. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah. Jakarta: Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- Dewi, Kumaladan M. Abdul Mukhyi. 2009. Pengaruh Luas Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengambilan Keputusan oleh Investor. Jurnal Penelitian Fakultas Ekonom Universitas Gunadarma. Depok.
- Fahmi, Irham. 2011. Manajemen Pengambilan Keputusan (Teori dan Aplikasi). Bandung: Alfabeta.
- Fokusmedia, Tim Redaksi. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005). Bandung: Fokus media.
- Gaol, Jimmy. 2008. Sistem Informasi Manajemen (Pemahaman dan Aplikasi). Jakarta: Grasindo.
- Halim, Abdul dan Muhammad SyamKusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Imam dan Tri Laksono Mugroho. 2009. Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hasan, M.Iqbal. 2004. Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hendriksen, Eldon dan M.F.van Breda. 2000. Teori Akuntansi Buku 1, Edisi 5. Diterjemahkan oleh: Herman Wibowo. Batam: Interaksara.
- <http://mohamad-ilmu.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-asas-asas-pemerintahan.html>(diakses 15 April 2012 pukul 18.47).
- Ikhsan, Arfandan Muhammad Ishak. 2005. Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: Salemba Empat.
- Irmawati. 2004. Peranan Goal Setting Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan. Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Kadir, Abdul. 2003. Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Krismiaji. 2010. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 3, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn

- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, 2001. Sistem Informasi akuntansi Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat
- Mulyana, Deddy. 2001. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soemarsono S.R, 2004, Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi 5, Salemba 4, Jakarta